

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Teguh Prasetyo . *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi pemikir Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,2009
- Teguh Prasetyo., “*Keadilan Bermartabat*”,*Perspektif Teori Hukum* Bandung: Nusa Media, 2021
- Teguh Prasetyo., “*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*”,Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo., “*Hukum Dan Teori Hukum*”, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila. Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta Cetakan IV , November 2011.
- Teguh Prasetyo Dan Ari Purnomosidi., *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila.*, Nusa Media., Bandung., 2014.
- Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberty., Yogyakarta 2008.
- Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat Hukum.*, Tiara Wacana, Yogyakarta Agustus 1997.
- Soetandyo Wignjosoebroto., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional., Dinamika Sosial -Politik dalam perkembangan Hukum di Indonesia.*, Raja Grafindo persada Jakarta 1995.
- Wolfgang Friedmann.,*Teori dan Filsafat Hukum.,Telaah Kritis Atas Teori Hukum.*, Raja Grafindo Persada., 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Cet. Ke 8 PT. Citra Aditya Bandung 2006.
- Mochtar Kusuma Atmaja & Bernard Arief Sidharta., *Pengantar Ilmu Hukum* Bandung 2000.
- Arief Sidharta, *Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 2006.

- Subekti, 1987., *Hukum Perjanjian*. Intermasa Jakarta.
- Suharmoko., 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa kasus*, Kencana., Jakarta
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Trading, 1975).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan ke V, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soimin & Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Ke I, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke VII, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud., 2006., *Penelitian Hukum.*, Kencana Jakarta.
- Endang Prasetyowati., *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama., Surabaya 2010
- Muhammad Abdul Kadir., 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum.*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan ke VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1981).

B. Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah.

- Damian Agata Yuvens, *“Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, Nomor 4 Desember 2017.
- Eva Dwinopianti, *“Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”*, Lex Renaissance, Vol 2, Nomor 1 Januari 2017.
- H. Habiburrahman, *“Teknik Pembuatan Putusan”*, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, Di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013.
- Haedah Faradz. *“Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, Nomor 3 September 2008.
- Iswantoro, *“Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”*, Al-Ahwal, Vol 11, Nomor 11 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975).
- Malik, *“Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”*, Jurnal Konstitusi, Vol 6, Nomor 1 April 2009.
- Marwin, *“Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”*, ASAS. Vol 6, Nomor 2 Juli 2014.
- Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Muchsin, *“Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional”*, Varia Peradilan Nomor 273 Agustus 2008.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992).
- Nuruddin Hadi, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Oken Shahnaz Pramasantya, *“Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 8, Nomor 2 Desember 2017.

Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol 6, Nomor 1 April 2017.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).

Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”, Veritas Et Justitia, Vol 5, Nomor 2 Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia UUPA Pasal 36 Tentang Hak Guna Bangunan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119. Tentang Harta Benda Perkawinan.

Republik Indonesia Pasal 35 Undang-Undang perkawinan Tentang Harta Benda Yang Diperoleh Selama Perkawinan.

Republik Indonesia UUPA Pasal 21 Tentang Pelepasan Hak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Penetapan No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg.

Republik Indonesia, Penetapan Pengadilan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ptk.

Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.